



**MENUJU KESEJAHTERAAN HIDUP  
IKHTIAR MEMAHAMI KHILAFAH ISLAMİYAH DAN TEO-  
DEMOKRASI**

**Hidayatussholihah**

Dosen Fakultas Agama Islam UNISSULA Semarang

Email: hida@unissula.ac.id

**Mumtazah Kamilah**

Mahasiswa Pasca Sarjana Kajian Timur Tengah

Fakultas Budaya dan Lintas Agama UGM Yogyakarta

Email: mumtazzawa@gmail.com

**Abstract**

*Islamic fundamental and islamic moderat communities be possessed one of types idealism who are hardfought as respons toward democratic system in effect for the moment. This written is spesifik to concern discussed about khilafah islamiyah concept from HTI and democratic-Teo as well as Islamic moderat communities to bring description about compability with purpose from a communities. This written also explicit about concept on the almighty sovereignty who are fondation precedent islamic fundamental in concept khilafah islamiyah as well as rule by the people sovereignty democracy to the find point source two of them.*

**Keywords:** *Khilafah Islamiyah Concept, Democratic-Teo, Sovereignty.*

**Abstrak**

*Kaum fundamentalis Islam dan kelompok moderat Islam memiliki satu bentuk idealisme yang diperjuangkan sebagai respon terhadap sistem demokrasi yang berlaku saat ini. Tulisan ini, lebih rinci membahas mengenai konsep khilafah Islamiyah dari HTI dan Teo-Demokrasi serta kelompok Islam moderat Indonesia untuk memberikan gambaran tentang kesesuaian tujuan dari masing-masing kelompok. Tulisan ini juga akan membahas lebih jelas gagasan kedaulatan Tuhan yang dijadikan fondasi kaum fundamental dalam konsep khilafah Islamiyah serta kedaulatan rakyat dalam demokrasi untuk menemukan titik temu antara keduanya.*

**Kata Kunci:** *Konsep Khilafah Islamiyah, Teo-Demokrasi, Kedaulatan.*

## A. Pendahuluan

Khilafah Islamiyah dan demokrasi sampai saat ini masih menjadi tema yang diperdebatkan khususnya oleh kelompok Islam di Indonesia. Perdebatan mengenai khilafah Islamiyah sebagai alternatif demokrasi dianggap tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dalam Islam. Dalam pandangan Hizbut Tahrir (HT) sebagai bagian dari kelompok fundamentalis Islam menyatakan bahwa khilafah Islamiyah dan demokrasi merupakan diskursus yang berbeda dan tidak bisa dikolaborasikan. Khilafah Islamiyah sendiri dijadikan konsep yang ditawarkan oleh HT untuk menegakkan kembali hukum syariat atas realitas kehidupan agar umat Islam terbebas dari ide, sistem perundang-undangan serta hukum kufur yang datangnya dari Barat khususnya paham demokrasi.<sup>1</sup>

Mereka secara terang-terangan menolak adanya hubungan apalagi kekterpaduan antara Islam dan demokrasi yang merupakan produk pemikiran politik dari Barat. Mereka jelas menegaskan bahwa Islam menolak kehadiran dan praktik demokrasi modern yang di bangun Barat terutama bangsa Eropa.<sup>2</sup> Alasan mereka menentang demokrasi karena di dalamnya terdapat konsep kedaulatan rakyat dalam arti penguasa dan rakyat memiliki kewenangan dalam menerapkan aturan syarak. Sedangkan menurut HT satu-satunya yang berhak menjadi penguasa adalah Tuhan karena di anggap memiliki kedaulatan penuh dan sempurna.<sup>3</sup> Demokrasi sebagai anak dari modernisasi mengagungkan rasionalisasi sehingga di anggap dapat menggerogoti pilar agama yang disebabkan oleh cara berpikir yang bertolak belakang sedangkan agama mengagungkan berbagai keyakinan spiritual. Di sisi lain, rasionalisasi membat habis dunia keyakinan karena dianggap tidak cocok dan bernilai empiris. Modernisasi dengan implikasi yang seperti ini telah membawa kegerahan bagi pemimpin Islam sehingga kemudian menawarkan solusi agar kembali kepada agama Islam berdasarkan atas amalan agama kaum Salafus Shalih.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> M. Zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 2007). Hlm 130.

<sup>2</sup> Idris Thaha, *Demokrasi religious*. (Jakarta: Teraju, 2005). Hlm 41.

<sup>3</sup> Sesuai dengan Qs. Yusuf: 67: “(إِن الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ)” yang artinya adalah hukum hanyalah milik Tuhan mereka menentang konsep kedaulatan rakyat yang menjadi dasar demokrasi. Diambil dari Heriyanto, *skripsi: Khilafah Islamiyah*, (Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005). Hlm 56-57.

<sup>4</sup> Nur Syam, *Tantangan Multikulturalisme Indonesia*. (Yogyakarta: Kanisius, 2013). Hlm 125-126.

Senada dengan HT, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga memaksakan berdirinya khilafah Islamiyah di Indonesia dengan alasan yang sama. Alasan mendasar mereka adalah melihat kegagalan demokrasi sebagai satu sistem negara yang juga terjadi di Indonesia, terbukti dengan adanya berbagai krisis yang melanda Indonesia baik dalam bidang politik ataupun ekonomi sehingga semakin menguatkan tekad mereka untuk membangun khilafah Islamiyah sebagai satu alternatif perbaikan sistem negara di Indonesia.

Berbeda dengan kelompok fundamentalis yang menolak sepenuhnya terhadap demokrasi, kelompok liberal Islam justru menerima sepenuhnya paham demokrasi. Mereka mengemukakan bahwa antara Islam dan Demokrasi memiliki keterkaitan yang erat dan berdampingan. Mereka menerima demokrasi sebagai satu pilihan yang universal yang dapat hidup berkembang di negara dunia muslim termasuk Indonesia. Demokrasi dapat disandingkan dengan Islam sepanjang demokrasi dan Islam tidak ada persoalan krusial yang perlu diperdebatkan karena di dalam keduanya memiliki kesamaan. Semua sistem yang berdiri di atas prinsip demokrasi sesuai dengan kaidah utama yang diserukan Islam. Islam dan demokrasi memiliki kesamaan dalam orientasi pada fitrah manusia. Islam yang mengajarkan *syura*, sangat berdekatan dengan substansi demokrasi. Bahkan, sebenarnya menurut mereka sistem negara yang telah diperjuangkan oleh sebagian kaum muslimin sebagai upaya mengembalikan sistem kekhalifahan pasca wafatnya Rasulullah merupakan sistem kekhalifahan yang di dalamnya terdapat *syura* sebagai padanan dari sistem demokrasi di era sekarang ini.<sup>5</sup> Dengan kata lain, khilafah Islamiyah tidak perlu lagi didirikan di Indonesia karena demokrasi nyatanya dari dulu telah sesuai dengan prinsip Islam dan sesuai dengan sistem pemerintahan pada masa kekhalifahan pasca wafatnya Rasulullah dengan konsep *syura*-nya yang sesuai dengan substansi demokrasi itu sendiri.

Sebagai penengah, tokoh dari kelompok moderat seperti Gus Dur dan Amien Rais memberikan pendapat yang lebih lentur. Mereka memang menolak didirikannya khilafah Islamiyah dengan konsepnya yang rigid dan memandang Islam sebagai satu

<sup>5</sup> Idris Thaha, *Demokrasi religious*. (Jakarta: Teraju, 2005). Hlm 46.

formalistik yang bisa menimbulkan banyak masalah jika diaplikasikan di Indonesia yang merupakan negara pluralistik. Akan tetapi, mereka juga menolak bentuk demokrasi yang tidak terdapat unsur syariat di dalamnya. Mereka mencoba mencari titik temu antara Islam dan demokrasi. Dalam pendapat ini, Gus Dur menolak jika Islam dijadikan alternatif ideologi bagi negara karena dalam satu negara pluralistik, menjadikan Islam atau agama apapun sebagai ideologi negara hanya akan memicu disintegrasi yang berbasis pada sektarianisme. Negara seperti Indonesia tidak mungkin memberlakukan nilai yang tidak di terima oleh semua warga negara yang berasal dari agama dan pandangan hidup yang berlainan. Sebagai alternatif, Gus Dur berpendapat bahwa Islam wajibnya diimplementasikan sebagai satu etika sosial (*social ethics*) yang berarti Islam berfungsi komplementer dalam kehidupan negara dan bukan sebagai fungsi suplementer. Memaksakan Islam sebagai ideologi negara hanya akan membawa kembali bangsa ini ke dalam masa penuh ketegangan dan pertentangan seperti terlihat hampir selama lima dekade sejak 1930-an.<sup>6</sup>

Sama halnya dengan Gus Dur, Amien Rais berpendapat bahwa dalam al-Quran dan as-sunnah tidak terdapat perintah untuk mendirikan negara Islam (*daulah Islam*) ataupun khilafah Islamiyah. Seandainya ada, maka al-Quran dan as-sunnah juga akan memberikan tuntutan yang detail tentang struktur institusi negara yang dimaksudkan. sama juga halnya ketika negara Islam disandingkan pada masa 14 abad yang silam, tetapi perlahan menjadi usang (*out of date*) dan tidak lagi memiliki kemampuan menanggulangi persoalan modern yang timbul sejalan dengan dinamika masyarakat. Untuk itu, Amien Rais menolak didirikannya khilafah Islamiyah kemudian secara tegas menyatakan menerima dan membela gagasan negara demokrasi sebagai sistem politik yang telah mengalami ujian sejarah peradaban manusia selama berabad lamanya dan kini telah diyakini secara universal sebagai sistem terbaik bagi kemanusiaan. Namun, meskipun menerima gagasan demokrasi, Amien Rais tetap mendasarkan pemikirannya pada syariah melalui bentuk titik temu antara Islam dan demokrasi yang biasa diistilahkan dengan kata Teo-Demokrasi.<sup>7</sup>

## **B. Konsep Khilafah Islamiyah HTI**

---

<sup>6</sup> Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999). Hlm 129.

<sup>7</sup> Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi...*, hlm 101-102.

Pada awalnya, khilafah Islamiyah merupakan gerakan yang lahir untuk menjawab krisis politik dan kepemimpinan umat Islam pasca wafatnya Rasulullah. Abu Bakar merupakan tokoh generasi awal yang dipilih dan ditunjuk oleh umat Islam untuk dijadikan khalifah pasca Rasulullah wafat yang selanjutnya digantikan oleh Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, dan terakhir adalah Ali ibn Abi Thalib. Peran dan posisi sahabat tidak hanya menggantikan Rasulullah sebagai tokoh agama, akan tetapi sekaligus menggantikan Rasulullah dalam urusan kemasyarakatan dan kenegaraan. Dapat dikatakan bahwa peristiwa ini merupakan bentuk sederhana dari gerakan khalifah periode awal yang kemudian memunculkan gerakan teologis keagamaan. Pada periode ini untuk pertama kalinya khawarij muncul sebagai aliran politik yang lahir atas respon rasa ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Ali bn Abi Thalib dan Muawiyah. Khawarij merupakan pelopor gerakan purifikasi Islam pertama dan berkembang hingga saat ini. Kelompok ini juga yang menjadi akar dari *Dārul Harbi* dan *Dārul Islam*. Khawarij juga mengenalkan konsep hijrah yaitu konsep berpindah dan bergabung dengan golongan mereka. Dari konsep ini muncul sikap eksklusif sehingga menjadikan khawarij terlihat ekstrim dan tidak kompromi terutama pada selain golongannya.<sup>8</sup>

Islam terus berkembang, sampai pada titik pertemuannya dengan Barat yang melahirkan kebangkitan baru dalam Islam dan sekaligus melahirkan sejumlah ketidakpuasan yang terekam dalam oposisi Islam pada Barat yang menyerupai gerakan eksklusif Islam pertama yaitu Khawarij. Jamaluddin al-Afghani bersama Muhammad Abduh merupakan tokoh awal yang merespon Barat beserta peradabannya. Keduanya merupakan tokoh modernis Islam pertama yang menginspirasi perlawanan terhadap Barat dan menganjurkan untuk kembali kepada al-Quran dan as-sunnah sebagai landasan ideal berfikir dalam kehidupan seorang muslim artinya bahwa kejayaan Islam hanya bisa dicapai dengan menjadi muslim secara murni. Melalui kedua tokoh ini, gerakan pemikiran dan politik Islam

---

<sup>8</sup> Heriyanto, *Skripsi: Khilafah Islamiyah*, (Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005). Hlm 44.

mengambil inspirasi baru untuk pertama kalinya. Perlu diketahui bahwa gagasan Abduh dan Jamaluddin lebih mirip dengan corak pemikiran gerakan Wahabisme.<sup>9</sup>

Seperti yang terlihat di era Modern ini, banyak negara yang menerapkan konsep demokrasi, aristokrasi, dan monarki sebagai sistem dalam bernegara. Indonesia sendiri menganut konsep demokrasi. Menurut HTI, sistem kenegaraan demikian merupakan produk Barat yang wajib dihindari karena tidak sesuai dengan prinsip Islam. Dalam pandangan HTI, berbagai krisis kehidupan terjadi akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan menyimpang manusia. Selama ini, telah terbukti bahwa dengan ideologi yang tidak berasaskan Islam, penataan kehidupan bermasyarakat dan bernegara menimbulkan banyak kemaksiatan. Dalam sistem sekuler misalnya, Islam hanya ditempatkan dalam urusan individu dengan Tuhannya. Sementara dalam urusan sosial kemasyarakatan, agama ditinggalkan. Maka, di tengah sistem sekularistik kemudian lahir berbagai bentuk tatanan yang jauh dari nilai Islam seperti tatanan ekonomi yang kapitalistik, perilaku politik yang oportunistik, budaya hedonistik, kehidupan sosial yang egoistik dan individualistik, sikap beragama yang sinkretik serta sistem pendidikan yang matrealistik.<sup>10</sup>

Melihat fenomena seperti ini, HTI sebagai gerakan fundamental mengharapkan terciptanya negara Islam karena syariat Islam dianggap telah mengatur segala urusan tanpa kecuali. Mulai dari hubungan manusia dengan penciptanya dalam konteks aqidah dan ibadah semisal shalat, puasa, zakat, haji sampai dengan jihad. Begitu pula hubungan manusia dengan dirinya sendiri seperti dalam urusan pakaian, makanan, serta akhlak. Selain itu, syariat Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya seperti dalam urusan pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, maupun politik luar negeri. Secara konseptual, semua telah di atur oleh Islam dengan sejelas-jelasnya. Dengan ungkapan lain, syariat Islam sesungguhnya meliputi keyakinan spiritual (*Aqidah Rubiyah*) dan ideologi politik (*Aqidah siyasiyah*) sehingga organisasi ini mencita-citakan satu perkumpulan masyarakat dan negara yang Islami. Seluruh kegiatan kehidupannya di atur sesuai dengan hukum syariat di bawah naungan daulah Islamiyah dalam bentuk khilafah Islamiyah.

---

<sup>9</sup> Heriyanto, *Skripsi: Khilafah Islamiyah...*, Hlm 45-46.

<sup>10</sup>M. Imdadun Rahmat. *Arus Baru Islam Radikal*. (tk: PT Gelora Aksara Pratama, 2005). Hlm 144.

Sistem pemerintahan Islam dijadikan sistem khilafah dengan pola pemerintahan yang unik dan sangat berbeda dengan pola pemerintahan yang lain. Sistem khilafah dianggap sebagai produk Tuhan dan bukan produk rakyat atau segelintir orang saja. Dalam konsep khilafah, kedaulatan dibedakan menjadi dua yakni kedaulatan dalam arti kekuasaan (*Sultan*) yang oleh syari'at diserahkan kepada umat Islam dengan kedaulatan dalam pengertian pembuatan undang-undang (*Tasyri'*) yang mutlak milik Tuhan. Demikian, HTI menolak kedaulatan rakyat dalam pengertian demokrasi yang memberikan hak tak terbatas kepada rakyat untuk memegang kekuasaan, sekaligus menentukan undang-undang. Menurut HTI, setiap umat Islam diberikan hak menggunakan kekuasaannya untuk mengangkat khalifah tunggal melalui pembaiatan sebagai tuntunan syariat Tuhan yang wajib dilaksanakan.

Mengenai mekanisme pengangkatan khalifah, HTI mengacu pada contoh yang dilakukan para sahabat dengan mengajak serta kaum muslimin mendiskusikan para kandidat dari mereka yang pantas mengemban jabatan khalifah, kemudian nama kandidat disodorkan kepada seluruh kaum muslim untuk dipilih dan yang terpilih wajib di baiat oleh seluruh umat Islam termasuk pihak yang tidak terpilih. Sedangkan dalam pemberhentian khalifah, HTI menetapkan mekanisme yang bersandar kepada persyaratan seorang khalifah dengan dalih mubah dan wajib diberhentikan. Bila seorang khalifah dinyatakan murtad, gila, menjadi tawanan musuh, fasiq, berganti jenis kelamin menjadi wanita atau waria, tidak mampu melakukan tugas karena cacat atau sakit, dan tidak mampu secara mandiri memutuskan kebijakan negara yang sesuai dengan syariat, maka ia wajib diajukan kepada mahkamah mazalim untuk diputuskan. Jika terbukti, maka ia wajib dilepaskan dari jabatannya.

Dalam sistem ini, meskipun umat Islam memiliki hak untuk memahami syariat sesuai dengan koridor syarak, tetapi mereka wajib meninggalkan seluruh tindakan yang berdasarkan pemahamannya karena khalifah memiliki wewenang atau otoritas untuk memutuskan pendapat tertentu dan menetapkan hukum. Pendapat inilah yang berlaku sebagai undang-undang dan umat Islam wajib menaatinya. Perbedaan pendapat yang sering terjadi di kalangan para ulama, termasuk para imam

madzhab hanya diperbolehkan dalam diskursus dan keyakinan sedangkan tindakan para penganutnya wajib tunduk kepada hukum yang diputuskan khalifah.<sup>11</sup>

### C. Konsep Teo-Demokrasi Islam Moderat

Menanggapi tentang konsep khilafah Islamiyah dari HTI, kelompok Islam Moderat Indonesia mencoba memberikan satu alternatif lain terkait mengusung kembali Syariah Islam dalam bernegara. Berbeda dengan HTI, menurut pendapat Islam Moderat diskursus demokrasi dan Islam dapat dikolaborasikan. Diskursus Islam dan demokrasi telah mulai mendapat tempat signifikan dalam pemikiran politik Islam modern. Dalam upaya untuk menemukan basis ideologis yang diterima oleh kalangan dunia Islam, para pemikir dari berbagai kalangan muslim mulai merambah misi baru untuk merekonsiliasi perbedaan antara berbagai kelompok politik. Sebenarnya, pertentangan antara Islam dan demokrasi terletak dari kedua substansi ini ditafsirkan.<sup>12</sup>

Dalam buku *Ilusi Negara Islam* “The Wahid Institute”, dikatakan bahwa maraknya fundamentalisme di Indonesia lebih disebabkan oleh kegagalan Negara mewujudkan cita-cita kemerdekaan berupa tegaknya keadilan sosial dan terciptanya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Korupsi yang masih menggurita menjadi satu bukti nyata dari kegagalan itu namun karena pengetahuan golongan fundamentalis sangat miskin tentang peta sosiologis Indonesia yang memang tidak sederhana, maka mereka menempuh jalan pintas bagi tegaknya keadilan dengan melaksanakan syariat Islam melalui kekuasaan. Layaknya HTI yang ingin mendirikan khilafah Islamiyah di Indonesia. Mereka mengidamkan pelaksanaan syariat dengan dalih Tuhan pasti meridai Indonesia.<sup>13</sup>

Dalam pelaksanaan demokrasi sebagai satu sistem negara, ragamnya akan meluas sehingga memang tidak dapat ditentukan model negara demokrasi yang akurat. pilihannya, Islam mampu berinteraksi dengan demokrasi. Akan tetapi, interaksi ini akan mengalami stagnasi jika Islam ditafsirkan secara rigid dan tradisional serta tidak mengalami transformasi seperti halnya kaum fundamentalis bernama HTI.

---

<sup>11</sup> M. Imdadun Rahmat. *Arus Baru Islam Radikal*. (tk: PT Gelora Aksara Pratama, 2005). Hlm 149-150.

<sup>12</sup> H. Nur Solikin, *Agama dan Problem Mondial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). Hlm 189

<sup>13</sup> Abdurrahman Wahid, *Ilusi Negara Islam*. (Jakarta: The Wahid Institute, 2009). Hlm 9.

Kebuntuan ini disebabkan bukan karena statisnya demokrasi melainkan rigidnya kaum fundamentalis dalam merumuskan identitas Islam ke dalam teologinya.

Dalam konteks Indonesia, Islam perlu dirumuskan dalam berbagai sudut pandang seperti sekularisasi, martabat manusia, solidaritas, kerjasama antaragama mengingat adanya pluralitas agama di Indonesia. Termasuk juga, untuk memegang syariat secara wajar dalam arti sumber syariat itu perlu di lihat secara proporsional guna mempertimbangkan aspek historis sehingga bisa ditemukan yang memang perenial dan yang bersifat spasial serta temporal.<sup>14</sup>

Amien Rais maupun Gus Dur sebagai perwakilan dari kelompok moderat sepakat bahwa Islam yang di dalamnya terdapat syariat merupakan etik moral bagi demokrasi dan tidak sebagai satu ideologi yang menggantikan demokrasi. Bagi Amien Rais, demokrasi justru dikatakan sebagai sistem politik yang terbaik dan rasional untuk menjamin tegaknya syariat agar tidak diselewengkan atau dideteriorisasikan. Menurutnya, di beberapa negara yang mengklaim sebagai negara Islam, syariat justru mengalami distorsi makna yang sangat dalam sehingga banyak dimanfaatkan sebagai legitimasi politik dan kurang fungsional dalam mewujudkan kemaslahatan umum. Dengan kata lain, satu signifikansi demokrasi bagi Amien Rais adalah untuk melindungi atau menjaga syariat.<sup>15</sup>

Gus Dur sejak awal sudah merumuskan syariat sebagai etika sosial (*social ethics*). Gus Dur memilih demokrasi sebagai sistem paling rasional yang memungkinkan terjaminnya pluralisme bangsa. Dalam konteks ini, demokrasi dan syariat dirumuskan dalam fungsi timbal-balik (komplementer). Syariat sebagai etika sosial dengan sendirinya bisa berfungsi sebagai etika politik dalam satu negara demokrasi. Syariat sebagai etika politik tidak perlu diundangkan dalam aturan hukum secara tertulis.<sup>16</sup> Gus Dur menambahkan bahwa demokrasi wajib terus diperjuangkan karena menurutnya landasan demokrasi pada dasarnya berupa keadilan dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang dan diartikan juga sebagai otonomi atau

<sup>14</sup> H. Nur Solikin, *Agama dan Problem Mondial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). Hlm 190.

<sup>15</sup> Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999). Hlm 182.

<sup>16</sup> Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi...*, Hlm 183.

kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidup sesuai dengan pilihannya. Demokrasi tidak mengesahkan adanya kemutlakan karena tersedianya ruang untuk negoisasi dan dialog merupakan keniscayaan.<sup>17</sup>

Syariat menurut Amien Rais di anggap sebagai sistem hukum yang lengkap dan terpadu yang telah meletakkan dasar (*Fundamental*), tidak hanya bagi hukum konstitusional tetapi juga hukum administratif, pidana, perdata, bahkan hukum internasional. Meski demikian, syariat tidak bisa dijadikan landasan utama karena masih sebatas memberikan prinsip dasarnya, mengingat manusia tumbuh secara dinamis dan selalu menghendaki keluwesan, kreativitas, dan dinamika hukum. Wajib di ingat bahwa dalam syariat, di samping terdapat bagian yang tidak dapat di ubah atau bersifat permanen, ada pula bagian yang bersifat fleksibel agar dapat memenuhi tuntutan perubahan zaman yang dinamis. Dalam konteks ini wajib dipahami secara cermat bahwa al-Quran dan as-sunnah dalam konstruksi syariat yang permanen tidak berfungsi sebagai kitab hukum (*Book of Laws*) melainkan sebagai sumber hukum (*Source of Laws*) artinya bahwa al-Quran dan as-sunnah wajib ditempatkan dalam konteks pemahaman yang fleksibel dan memiliki kemampuan adaptif bagi pemecahan masalah kehidupan manusia, tanpa harus bergerak dari prinsip abadi yang telah ditetapkan oleh Tuhan.<sup>18</sup>

Amien Rais dan Gus Dur secara tegas menolak didirikannya khilafah Islamiyah dan mendukung demokrasi yang di dalamnya terdapat konsep syariat yang berperan sebagai kode etik. Amien Rais mengatakan bahwa Inti demokrasi merupakan persamaan hak dan kedudukan dari setiap warga negara di dalam satu negara yang demokratis. Jika ingin menegakkan demokrasi, wajib melibatkan pengertian konsep meliputi demokrasi politik, sosial, ekonomi, hukum, dan pendidikan.<sup>19</sup> Keberpihakan Amien Rais terhadap demokrasi merupakan pilihan yang strategis bagi tujuan kehidupan politik yang dicita-citakan yaitu satu kondisi kehidupan masyarakat yang bersumber dari prinsip dasar ajaran Islam. Politik bagi Amien Rais lebih dari sekedar membuat orang lain berperan karena merupakan wujud realisasi kesadaran etik keagamaan atas peran individu yang bermanfaat bagi

---

<sup>17</sup> Al-Zastrow, *Gus Dur Siapa sih Sampeyan?* (Jakarta: Erlangga, 1999). Hlm 89-90.

<sup>18</sup> Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999). Hlm 100.

<sup>19</sup> Tim Maula, *Jika Rakyat Berkuasa*. (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999). Hlm 189.

masyarakat. Dalam kancah demokratisasi, peran imam berdasar dipilih sebagai strategi mencapai kehidupan yang lebih demokratis di bawah paradigma etika keagamaan Islam.<sup>20</sup>

#### **D. Kedaulatan Tuhan dan Kekhalifahan Manusia**

Maulana al-Maududi berpendapat tentang gagasan bahwa Tuhan merupakan pembentuk hukum dalam satu negara Islam, sementara manusia merupakan sumber hukum dalam sistem demokrasi. Ia mengemukakan konsep kedaulatan (*al-hakimiyyah*) dan berargumen bahwa dalam satu negara Islam, Tuhan merupakan pemegang kedaulatan tunggal sementara dalam satu sistem demokrasi, kedaulatan rakyat lah yang memegang kendali. Menurutnya ada kesalahpahaman kaum fundamentalis dalam menafsirkan konsep kedaulatan dan demokrasi karena menyiratkan lebih dari sekedar pemerintahan oleh kelompok mayoritas. Demokrasi konstitusional memberi jaminan perlindungan kepada semua individu terhadap dominasi mayoritas. Pernyataan bahwa hak asasi manusia tidak boleh di langgar sebagai hak yang tidak dapat di hapus bahkan oleh kehendak mayoritas sekalipun. Ini merupakan contoh bahwa demokrasi bukanlah sekedar pemerintahan mayoritas. Lebih jauh lagi, para Islamis yang berbicara tentang kedaulatan Tuhan memiliki satu konsep yang belum luas tentang kedaulatan. Kaum muslim wajib memahami bahwa kedaulatan sementara adalah milik Tuhan, akan tetapi pelimpahannya yang terjadi adalah dalam bentuk kekhalifahan manusia.<sup>21</sup>

HTI, sebagai satu kelompok yang gencar mengkampanyekan ide berdirinya khilafah Islamiyah di Indonesia, cenderung menolak kedaulatan rakyat yang merupakan dasar dari demokrasi. Hal ini sesuai dengan pemikirannya yang formal tentang Islam yang memandang doktrin agama dalam wajahnya yang legalistik dan formalistik. Implikasinya menjadi satu pandangan yang literal. Menurut mereka, demokrasi di pandang bertentangan dengan Islam karena demokrasi mensyaratkan kedaulatan rakyat sebagai penguasa dan rakyat memiliki kewenangan dalam

<sup>20</sup> Arief Afandi, *Islam Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais*. (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 1997). Hlm 102.

<sup>21</sup> El Fadl, *Islam dan Tantangan Demokrasi*. (Jakarta: Ufuk Press, 2004). Hlm 67.

menetapkan aturan syarak. Sementara bagi HTI di samping Islam mengakui kedaulatan manusia untuk membat "penguasa", manusia sebagai hamba dengan berbagai cara sekalipun tidak dapat mengabaikan kedaulatan Tuhan untuk menentukan hukum syarak.<sup>22</sup>

Menanggapi konsep kedaulatan Tuhan yang ditafsirkan oleh kaum fundamentalis khususnya HTI, oleh el Fadl menyebut bahwa al-Quran sendiri tidak menjelaskan secara khusus bentuk pemerintahan tertentu. Tapi al-Quran jelas menyebutkan seperangkat nilai sosial dan politik yang penting bagi satu pemerintahan Islam. Tiga nilai Qurani berikut memiliki signifikansi khusus untuk mencapai keadilan melalui kerjasama sosial dan prinsip saling membantu membangun satu sistem pemerintahan yang konsultatif dalam arti tidak otokratis dan melembagakan kasih sayang dalam interaksi sosial. Jadi, berdasarkan konsep kedaulatan Tuhan oleh kaum fundamentalis dalam arti HTI, justru belum sesuai dengan syariat Islam yang ingin mereka usung. Karena, jika melihat konsep khilafah Islamiyah ala HTI, sistem pemerintahannya justru masih jauh dari aspek kerjasama dan tidak bersifat konsultatif bahkan bisa dikatakan sangat otokratis. Hal ini tidak sesuai dengan perintah Tuhan dalam ayat al-Quran yang telah disebutkan di atas.<sup>23</sup>

Berbeda dengan HTI, kelompok Islam Moderat yang diwakilkan oleh Gus Dur dan Amien Rais menerima paham kedaulatan rakyat dengan alasan yang mendasar. Amien Rais secara tegas telah mengatakan bahwa keabadian wahyu Tuhan justru terletak pada tidak adanya perintah dalam al-Quran maupun as-sunnah untuk mendirikan negara Islam. Al-Quran dan as-Sunnah sebatas memberikan dasar (*Fundamental*) perihal pembentukan negara semisal, prinsip keadilan, persamaan, maupun musyawarah. Sedangkan soal konstitusi, aturan hukum, prosedur dan mekanisme politik diserahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk menentukan secara detail. Senada dengan Amien Rais, Gus Dur juga sangat apresiatif terhadap gagasan kedaulatan rakyat, karena tanpa ini mekanisme politik akan timpang. Baginya, kedaulatan rakyat merupakan satu prinsip universal Islam dalam rangka

---

<sup>22</sup> Saifullah dkk, *Mengenal Hizbut Tabrir Partai Politik Islam Ideologis*. (Bogor: PT. Thariqul Izzah, 2002). Hlm 70.

<sup>23</sup> El Fadl, *Islam dan Tantangan Demokrasi*. (Jakarta: Ufuk Press, 2004). Hlm 12.

menyejahterakan kehidupan kemanusiaan sebagaimana termuat dalam konsep al-Quran bernama *rahmatan li al Amien*.<sup>24</sup>

Dalam buku *Ilusi Negara Islam*, Gus Dur menyebutkan bahwa keyakinan umat Islam atas Tuhan dalam mengatur semua aspek hidup manusia digunakan dengan penuh taktik oleh kaum fundamentalis. Memang benar Tuhan mengatur semua aspek kehidupan manusia, akan tetapi pemahaman politis kelompok radikal merupakan kesalahpahaman yang berpangkal pada belum luasnya pemahaman mereka tentang Islam. Para ulama moderat memahami keyakinan bahwa Tuhan tidak mengatur semua aspek kehidupan manusia secara politik dan kekuasaan melainkan secara spiritual dan cinta. Berislam secara ikhlas dan mendalam bisa bermakna jika menemui titik temu ketika mampu berserah diri secara totalitas kepada Tuhan dan bukan pada kehendak nafsu termasuk yang dikemas dalam retorika politik kelompok yang mengklaim berhak mewakili Tuhan untuk memanfaatkan agama sebagai alat menguasai semua aspek hidup bagi setiap individu.<sup>25</sup>

Gambarannya seperti dalam teori politik syariat (*Siyasah Syar'iyah*), penguasa atau kepala negara (imam) secara eksklusif memegang kekuasaan eksekutif (*as-Sulthab at-Tanfidiyyah*) penuh untuk mengambil satu keputusan dan kebijakan yang menyangkut kehidupan publik berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Namun, untuk menghindari adanya penyelewengan wewenang dan kekuasaan oleh seorang penguasa, maka rakyat wajib di beri kebebasan penuh untuk senantiasa melakukan kritik dan koreksi atas jalannya roda pemerintahan. Mekanisme ini di atur secara sistematis dalam sistem politik demokrasi, sehingga kedaulatan rakyat sangat dihargai dan di junjung tinggi.<sup>26</sup>

Hemat penulis, bahwa konsep kedaulatan Tuhan dari kaum fundamentalis khususnya HTI, di anggap sebagai satu pemikiran yang belum luas. Pemahaman ini justru justru dinilai bertentangan dengan isi al-Quran yang wajib dipahami oleh kaum

<sup>24</sup> Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999). Hlm 178-179.

<sup>25</sup> Abdurrahman Wahid, *Ilusi Negara Islam*. (Jakarta: The Wahid Institute, 2009). Hlm 223-224.

<sup>26</sup> Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999). Hlm 181.

muslim bahwa kedaulatan sementara adalah milik Tuhan, akan tetapi ia telah melimpahkannya dalam bentuk kekhalifahan manusia seperti yang dikemukakan oleh Islam Moderat bahwa sebenarnya ada kolaborasi antara Tuhan dan manusia dalam hal kedaulatan. Menurutnya, kedaulatan Tuhan berada dalam ruang spiritual dan cinta, sedangkan ruang politik dan kekuasaan telah dilimpahkan kepada kekhalifahan manusia.

### **E. Khilafah Islamiyah: Peluang dan Tantangannya di Indonesia**

Berbicara mengenai peluang dan tantangan khilafah Islamiyah di Indonesia, nampaknya bisa di lihat pada keadaan Indonesia terkait kondisi masyarakat dan politiknya saat ini. Selain itu, melihat dari cara dan usaha HTI demi menerapkan konsep khilafah Islamiyah di Indonesia serta prestasi yang berhasil dicapainya sebagai tangga menuju berdirinya khilafah Islamiyah. Nama HTI mulai menanjak populer pasca reformasi. Tokoh yang selalu dikaitkan namanya dengan masuk dan berkembangnya HTI adalah Abdurrahman al Baghdadi. Sampai kini, pusat kegiatan HTI masih terkonsentrasi di perguruan tinggi dan tentu saja sebagian besar aktivis beserta simpatisannya merupakan mahasiswa, dan beberapa tokohnya hampir selalu memiliki keterkaitan dengan aktivitas di lingkungan universitas. Tampaknya simpatisan terbesar HTI saat ini berada di sekitar daerah Bogor. Beberapa kampus utama, seperti Institut Pertanian Bandung (IPB) ditengarai menjadi suplayer utama anggota dan simpatisan HTI di daerah sekitar itu. Selain melalui gerakan aksi massa, aktivitas yang terlihat intensif dilakukan HTI adalah melakukan serangkaian diskusi secara rutin tentang topik yang beragam untuk meyakinkan bahwa berdirinya khilafah Islamiyah merupakan solusi semua problematika yang terjadi di bumi ini.<sup>27</sup>

Konsep khilafah Islamiyah yang ditawarkan oleh HTI sebagai satu sistem negara yang ingin diterapkan di Indonesia, nampaknya memiliki peluang yang gemilang. Terlepas dari kontroversi silang pendapat dalam memberikan pemaknaan mengenai meningkatnya pandangan perlunya pemberlakuan syariat Islam secara ketat, namun perkembangan yang berlangsung di lapangan menggambarkan tuntutan pemberlakuan syariat Islam yang tidak lagi menjadi sekadar wacana. Agenda formalisasi syariat Islam terus bergerak dan menyebar melalui berbagai ruang politik

---

<sup>27</sup> M. Zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 2007). Hlm 129-130.

yang ada, satu caranya dengan duduk serta pada kebijakan pemerintah daerah yang kini otonom. Kebijakan otonomi daerah yang memberikan ruang kebebasan atau otonomi untuk membuat peraturan daerah (PERDA) yang lepas dari campur tangan pemerintahan pusat, merupakan sasaran paling tepat dimanfaatkan untuk mewujudkan kekuatan politik lokal. Dengan membonceng otonomi daerah maka proses perumusan PERDA bisa dikatakan menjadi arena pertarungan paling sengit yang akan menentukan berhasil atau tidaknya keinginan untuk mewujudkan aspirasi pemberlakuan syariat Islam.<sup>28</sup>

Sebagaimana terbukti di beberapa daerah seperti Cianjur, Garut, Banten, Indramayu, Pamekasan, dan yang saat ini di coba di Makassar, PERDA berhasil dijadikan pintu masuk bagi penerapan syariat Islam. Kecenderungan gerakan “Syariatisasi” yang memanfaatkan alat (*instrument*) otonomi daerah ini di luar perkiraan banyak kalangan sebelumnya. Dalam mencapai kebijakan otonomi daerah sendiri terdapat pembagian kewenangann antara kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan daerah. Pada pasal 7 UU Nomor 22/1999 misalnya, memuat kewenangan daerah yang mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali beberapa hal yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, seperti urusan politik luar negeri, bidang pertahanan dan keamanan, bidang peradilan, urusan agama, dan moneter-fiskal. Apabila mengacu kepada pokok kewenangan pemerintah pusat, maka kebijakan pemerintah daerah tentang syariat Islam tidak memiliki kekuatan sanksi hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan atas kebijakan yang mereka keluarkan.<sup>29</sup>

Pendapat responden yang berafiliasi dengan HTI, KAMMI, KPPSI dan Jamaah Tarbiyah tentang PERDA syariah dan khilafah Islamiyah memiliki kemiripan namun dalam bahasa katanya terdapat perbedaan. Pada dasarnya, mereka memiliki satu suara atas PERDA syariah dan khilafah Islamiyah bisa berdiri di Indonesia. KPPSI dan Jamaah Tarbiyah melalui jalur politik dan kultural, sedangkan HTI melalui jalur kekuasaan pragmatis, dan sementara KAMMI melalui jalur politik di

<sup>28</sup> M. Zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia...*, Hlm 172-173.

<sup>29</sup> M. Zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 2007). Hlm 173.

kampus maupun di parlemen sebagai sayap politik PKS. Karena itu, jelas bahwa penegakan syariat telah menjadi agenda bersama. Menurut survei PPIM UIN Jakarta yang dilakukan pada tahun 2002, mengenai implementasi syariat Islam di Indonesia, menunjukkan bahwa Sebanyak 67 persen dari jumlah responden menyatakan perlunya Indonesia diperintah dan diatur dengan hukum Islam, sementara survei yang sama pada tahun 2001 hanya 57 persen. Terkait kepemimpinan dalam Islam, 67 persen responden menyatakan setuju Indonesia dipimpin berdasarkan al-Quran dan as-sunnah, dan 70,8 persen setuju Indonesia menjadi negara Islam. Bisa jadi pembentukan khilafah Islamiyah yang menawarkan syariat Islam sebagai Ideologi negara memiliki peluang yang cukup besar untuk diterapkan di Indonesia melihat dari jumlah responden yang mencapai angka 70,8 persen.<sup>30</sup>

Menanggapi hal ini, kelompok Islam Moderat juga berkeinginan mengusung tema syariat Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia secara substansial, Gus Dur sebagai tokohnya memiliki pendapat bahwa bentuk syariat Islam yang hendak diterapkan, mau tidak mau harus direlevansikan dengan perkembangan kehidupan di sekitarnya. Menurut Gus Dur, pemikir Islam wajib memiliki pendekatan multi-dimensional kepada kehidupan, dan tidak hanya terikat kepada ketentuan normatif yang telah mengendap sekian lama, bahkan hampir menjadi fosil yang mati.<sup>31</sup> Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, HTI berpendapat bahwa Islam di Indonesia atau negara lainnya berada akan bisa mengalami kemajuan yang mengagumkan apabila mereka meniru dan mempraktikkan gagasan yang diajarkan Rasulullah dan para sahabatnya karena pada masa Rasulullah Islam sudah tertata secara utuh. Pandangan ini, memutar kembali dimensi kehidupan umat Islam pada masa lalu yang ia sendiri tidak terlibat di dalamnya dan pandangan semacam ini justru mengantarkan pola pikir romantisme sejarah dan mengingkari realitas. Terlepas dari segala kekurangan dan kelebihan khilafah Islamiyah, dalam upaya mengembalikan kehidupan masa lalu untuk konteks kekinian tentu bukan merupakan pilihan yang bijak untuk dikeluarkan umat Islam dari keterpurukan serta ketertinggalan mereka dari peradaban Barat.

---

<sup>30</sup> Abdurrahman Wahid, *Ilusi Negara Islam*. (Jakarta: The Wahid Institute, 2009). Hlm 164-165.

<sup>31</sup> Abdurrahman Wahid, *Ilusi Negara Islam...*, Hlm 38-39.

langkah semacam ini malah akan semakin memperlebar jarak keteringgalan umat Islam itu sendiri.<sup>32</sup>

Dalam menerapkan khilafah Islamiyah di Indonesia, nampaknya HTI wajib berhadapan dengan desakan modernitas yang kian tak terbendung. Para pembaharu Muslim melihat beberapa alasan terkait desakan modernitas yang dapat dijadikan pendapat untuk memperkuat penolakan terhadap konsep Khilafah Islamiyah. *Pertama*, adanya gagasan negara kebangsaan (*Nation-State*) yang sedang mengganti cita negara keagamaan (*Khilafah*) sebagai kebijakan sipil umat yang dominan di zaman modern. *Kedua*, adanya rasionalisme yang menekankan agar melepaskan diri dari nilai parokial demi kepentingan penemuan akal yang dapat diterapkan secara universal. *Ketiga*, dihapuskannya khilafah Islamiyah secara resmi oleh Mustafa Kamal Attaturk pada tahun 1924 karena dorongan untuk mendirikan negara modern.<sup>33</sup> Ketika khilafah Islamiyah dengan konsep yang sedemikian rupa berhadapan dengan tantangan global, seringkali menuai kegagalan dalam mencapai tujuannya. Karena memang tidak mudah mentransformasikan khilafah Islamiyah ke dalam arus pemikiran negara modern. Dalam hal ini diperlukan persyaratan yang bersifat sosial budaya, ekonomi, maupun politik.<sup>34</sup>

Selain itu, tantangan lain yang cukup berat yang harus dihadapi oleh khilafah Islamiyah adalah adanya pluralisme agama di Indonesia. Adanya pluralisme agama di Negeri ini menjadi realitas empirik yang tidak bisa dipungkiri. Pluralisme sejak dulu telah di kenal sebagai potensi berbangsa dan bernegara sehingga pendirinya (*Founding fathers*), menetapkan negara ini bukan menjadi negara agama atau negara sekuler. Pilihannya tepat berada di tengah-tengah keduanya. Maka, ketika hendak memaksakan satu agama menjadi sebuah ideologi negara akan menjadi berat dan problematis.<sup>35</sup>

<sup>32</sup> Khamami Zada, dan R. Arofah Arief, *Diskursus Politik Islam*. (Ciputat: LSIP, 2004). Hlm 48-49.

<sup>33</sup> Khamami Zada, dan R. Arofah Arief, *Diskursus Politik Islam...*, Hlm 50-51.

<sup>34</sup> Heriyanto, *Skripsi: Khilafah Islamiyah*, (Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005). Hlm 89-91.

<sup>35</sup> Sumarthana, dkk. *Pluralisme, konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). Hlm V.

Himbauan dari Islam Moderat kepada umat Islam sebagai respon akan didirikannya Khilafah Islamiyah di Indonesia, bahwa sebagai elemen terbesar bangsa ini bahkan komunitas muslim terbesar di dunia. Umat Islam Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab moral yang sangat besar untuk menyelamatkan NKRI dan Pancasila dari berbagai ancaman, juga berkewajiban menyelamatkan Islam dari pembajakan dan pemudaran nilai-nilainya yang luhur dan mulia. Semua ini bisa dilakukan, dengan menyadari keterbatasan pemahaman dan pengetahuan untuk terus belajar secara terbuka dan rendah hati, serta mengamalkan ajaran agama yang penuh spiritualitas dan kasih sayang kepada Tuhan. Jika demikian, individu bisa bersikap toleran dan menghargai perbedaan, kebebasan, serta menolak usaha siapapun yang hendak menjadikan Islam sebagai media kekuasaan.<sup>36</sup>

#### **F. Penutup**

HTI dan Islam moderat memiliki target yang sama yaitu ingin mensyariatkan negara. Akan tetapi, cara pandang terhadap syariat serta proses pensyariaan negara dari kedua kelompok sangat berbeda. Jika HTI memandang syariat dalam bentuknya yang legalistik dan formalistik guna merekonstruksi tatanan sistem negara demokrasi yang telah ada dengan sistem baru berupa khilafah Islamiyah yang mereka yakini sebagai satu alternatif dari gagalnya demokrasi, maka kelompok Islam moderat memandangnya dalam bentuk yang substansial. Jika HTI menginginkan syariat menjadi ideologi negara dengan mendirikan khilafah Islamiyah untuk menggantikan demokrasi, maka Islam moderat ingin syariat menjadi kode etik dalam negara demokrasi yang melahirkan Teo-Demokrasi.

Mengenai tanggapan Islam moderat terhadap Kedaulatan Tuhan dalam khilafah Islamiyah HTI, bahwa kedaulatan Tuhan di anggap sebagai satu pemikiran yang belum luas karena di anggap bertentangan dengan semangat Islam yang mengajarkan kepemimpinan yang konsultif dan tidak ada unsur otokritas. Sebenarnya terdapat kolaborasi antara Tuhan dan manusia dalam hal kedaulatan. Menurut Islam moderat, kedaulatan Tuhan berada dalam ruang spiritual dan cinta sedangkan ruang politik dan kekuasaan telah dilimpahkan kepada kekhalifahan manusia.

---

<sup>36</sup> Abdurrahman Wahid, *Ilusi Negara Islam*. (Jakarta: The Wahid Institute, 2009). Hlm 219-220.

Adapun peluang dan tantangan berdirinya khilafah Islamiyah di Indonesia, berdasarkan yang sudah berhasil penulis simpulkan, bahwa sebenarnya khilafah Islamiyah memiliki peluang yang cukup besar untuk dapat berdiri di Indonesia, melihat pada fenomena yang terjadi mengenai telah diterapkannya syariat Islam pada PERDA di beberapa daerah di Indonesia serta dari hasil survei yang dilakukan oleh PPIM UIN Jakarta yang dilakukan pada tahun 2002, bahwa ada sebanyak 70,8 persen responden yang setuju mengubah Indonesia menjadi negara Islam. Akan tetapi ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh khilafah Islamiyah yaitu semakin kuatnya arus Modernitas yang melanda dan menghegemoni hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Ditambah, ketika melihat pada konteks Indonesia sebagai negara yang pluralistik, nampaknya akan terdapat banyak kendala untuk memaksakan berdirinya khilafah Islamiyah di Indonesia. Karena hal itu sama saja memaksakan satu agama untuk menjadi sebuah ideologi negara yang terdapat beberapa agama di dalamnya.

Simpulan terakhir dari penulis, bahwa ternyata kepedulian rakyat Indonesia secara individual atau kelompok, masih sangat tinggi terhadap keadaan Indonesia, yang sedang mengalami krisis politik dan ekonomi seperti sekarang ini. Dibuktikan dengan adanya ide Khilafah Islamiyah dari HTI, dan Teo-Demokrasi dari Islam Moderat, terlepas dari kelebihan dan kekurangan dari keduanya, semuanya dilahirkan atas dasar niat untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik.

### Daftar Pustaka

- Afandi, Arief. 1997. *Islam Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais*. Yogyakarta: Putaka Pelajar.
- Wahid, Abdurrahman (Ed). 1999. *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: LKIS.
- Al-Zastrow. 1999. *Gus Dur Siapa sih Sampeyan?*. Jakarta: Erlangga.
- Masdar, Umaruddin. 1999. *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Maula, 1999. *Jika Rakyat Berkuasa*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Effendy, Bahtiar. 2001. *Masyarakat Agama dan Pluralisme Agama*. Yogyakarta: Galang Press.
- Saifullah, dkk (Ed). 2002. *Mengenal Hizbut Tahrir Partai Politik Islam Ideologis*. Bogor: PT. Thariqul Izzah.
- El, Fadl. 2004. *Islam dan Tantangan Demokrasi*. Jakarta: Ufuk Press.
- Zada, Khamami dan Arief, R. Arofah. 2004. *Diskursus Politik Islam*. Ciputat: LSIP.
- Rahmat, M. Imdadun. 2005. *Arus Baru Islam Radikal*. tk: PT Gelora Aksara Pratama.
- Sumarthana, dkk. 2005. *Pluralisme, konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Skripsi*. Heriyanto. 2005. *Khilafah Islamiyah*. Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Thaha, Idris. 2005. *Demokrasi religious*. Jakarta: Teraju.
- Mubarak, M. Zaki. 2007. *Genealogi Islam Radikal di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia.
- Abbas, Tahir. 2007. *Islamic Political Radicalism*. Manchester: Servis Filmsetting, Ltd.
- Wahid, Abdurrahman (Ed). 2009. *Ilusi Negara Islam*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Rifa'I, Muhammad. 2010. *Gus Dur: KH. Abdurrahman Wahid Biografi Singkat 1940-2009*. Yogyakarta: Garasi House of Book.
- Ramli, Muhammad Idrus. 2013. *Jurus Ampuh membungkam HTI*. Surabaya: Bina Aswaja.
- Solikin, H. Nur. 2013. *Agama dan Problem Mondial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syam, Nur. 2013. *Tantangan Multikulturalisme Indonesia*. Yogyakarta: kanisius.
- Qodir, Zuly. 2014. *Radikalisme Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.